



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNA 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2025, yang didalamnya mengandung penjabaran tentang kebijakan strategis dan operasional dengan mengacu kepada draft Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan ini memberikan panduan dan pedoman bagi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2025.

Adapun pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 ini adalah pelaksanaan program, output dan kegiatan-kegiatan prioritas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui uraian pokok bahasan tersebut diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mempedomaninya secara cermat sekaligus memberikan saran dan masukan yang bermanfaat serta dasar pelaksanaan evaluasi kinerja.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini.

Tahuna, 24 Maret 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna



Martin Yermias Luhulima, S.H, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Maksud dan Tujuan	16
C. Struktur Organisasi	17
D. Sistematika Penyajian	22
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	23
B. Evaluasi Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025	27
A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025.....	27
B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.	27
C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2025.....	28
D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025	30
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 33/MEN/2016 tanggal 28 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Philipina. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna membutuhkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam draft Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, menggambarkan pedoman kinerja tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode yang sama.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025 dimaksudkan memberikan acuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam menselaraskan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025, adalah :

- 1) Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi;

- 3) Memberikan arah dan kebijakan operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode tahun 2025.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, tugas UPT Stasiun PSDKP Tahuna adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit Eselon IVa, UPT Stasiun PSDKP Tahuna dibantu oleh Tim Kerja (Timja) dan Satwas serta Wilker Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial;
2. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas;
3. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
5. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
6. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Talaud;

a) Wilker Pengawasan SDKP Salibabu;

b) Wilker Pengawasan SDKP Beo;

c) Wilker Pengawasan SDKP Karatung.

Penjabaran tugas dan fungsi tim kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tugas:

Melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengarsipan dan pengaduan masyarakat/WBS;
- d. Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas

Tugas:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan

prasarana pengawasan serta perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal dan *speedboat* pengawas kelautan dan perikanan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kegiatan dibidang prasarana dan sarana infrastruktur pengawasan yang menunjang kegiatan penyelenggaraan pengoperasian kapal dan *speedboat* pengawas kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dipemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan serta penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;

3. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di penanganan pelanggaran, awak kapal, barang bukti serta sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
- b. Penerapan dan perumusan sanksi administratif dalam penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan
- c. Penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, memfasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut.

4. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dibidang intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan penangkapan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan penangkapan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut barang hasil tindak pengawasan perikanan.

5. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi dibidang intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan.

Fungsi:

- a. Penyediaan informasi, monitoring dan evaluasi dalam bentuk data pada bidang intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan, jenis ikan dilindungi kegiatan perikanan merusak serta keanekaragaman hayati perairan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau

-
- kecil, produk dan jasa kelautan, kawasan konservasi perairan, jenis ikan dilindungi kegiatan perikanan merusak serta keanekaragaman hayati perairan;
- d. Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut barang hasil tindak pengawasan kelautan

6. *Satuan Pengawasan Talaud dan 3 (tiga) Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Talaud*

Tugas:

Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perpanjangan tangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- c. Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan Speed Boat Pengawasan;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;

Struktur organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna terdiri dari Kepala Stasiun (eselon IVa), Kepala Urusan Umum/Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial (eselon Va). Serta Jabatan Non Eselon, yakni Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas, Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan serta Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan.



Gambar Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.
2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.
3. Bab III Rencana Kerja
Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.
4. Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Stasiun PSDKP Tahuna sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hirarki UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Maka secara runut dijelaskan perubahan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna sepanjang tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas [indeks];	91,00	98,44
		2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [indeks];	91,00	100,0
		3. Indeks pemenuhan logistik kapal pengawas [%]	100	100
2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan [%];	100	100
		5. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP [%];	100	100
3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan [Nilai];	100	100
4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan [Nilai];	100	100
5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran	8. Indeks pengenalan sanksi administratif bidang	80	80

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
	bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	kelautan dan perikanan [indeks];		
		9. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan [indeks];	80	80
6	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	10. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan [indeks]	93	100
7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks];	80	90,51
		12. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	75	87,89
		13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100	100
		14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]	75	83,67
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	84	87,20
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya	80	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		telah dilengkapi dan disampaikan [%];		
		17. Nilai implementasi program budaya kerja [nilai];	70	81,24
		18. Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik [unit];	1	1
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	94	133,33
		20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	80	100
		21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80	83,49
		22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai];	93,76	93,78
		23. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai]	71,00	84,95

Tabel Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2024

B. Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 mengacu kepada draft Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki visi “Peningkatan Kualitas Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif di Stasiun PSDKP Tahuna untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.” Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;

2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna. Pelaporan tersebut sebagai dasar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

Total anggaran tahun 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp.17.138.336.000,- (Tujuh belas milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.16.855.839.146,- atau 98,35 %.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025

A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025.

Sebagai pelaksana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan penelaahan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada kegiatan prioritas nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaannya tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan sebagai stakeholder dalam kegiatan pengawasan.

B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa informasi terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP yaitu;

- 1) Bidang Perikanan Tangkap;
 - Terdapat peningkatan IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna selama 2 tahun terakhir;
 - Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI-Filipina;
- 2) Bidang Perikanan Budidaya;
 - Masih adanya unit budidaya ikan yang belum terdaftar / teregistrasi;
 - Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- 3) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar / teregistrasi;
 - Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang diperiksa.
- 4) Bidang Distribusi Hasil Perikanan;
 - Kegiatan distribusi yang belum tereksplor secara menyeluruh;
- 5) Bidang Jasa Kelautan dan Destructive Fishing;

- Penambangan pasir laut tanpa izin resmi dari pemerintah pusat;
- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak, seperti penyetruman ikan, pembiusan ikan dan penggunaan alat bantu kompresor dalam penangkapan ikan;
- Belum optimalnya kegiatan pemanfaatan pada BMKT di sekitar lokasi;
- Belum terlaksananya pengawasan pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan arah kebijakan, strategi pelaksanaan pengawasan serta kegiatan prioritas nasional bidang Kelautan dan Perikanan yang perlu diwujudkan pada tahun 2025, maka terdapat 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan.

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		7.503.277
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana		6.930.075
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	51 Hari Operasi	5.941.545
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	988.530
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		196.455
2351.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	50.000
2351.BCE	Penanganan Perkara	2 Perkara	146.455
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		376.747
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1 Operasi	124.747
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2 Laporan	20.000
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	19 Lembaga	232.000
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		6.789.908
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.789.908
2355.CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8 Unit	67.500
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan	6.146.809
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 Unit	89.964
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM	24 Orang	69.300
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 Dokumen	416.785

Tabel Program, Aktivitas dan KRO Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

Berdasarkan tabel redesain program, aktivitas dan anggaran tahun 2025 di atas, maka disusunlah Sasaran Kinerja dan Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang berpedoman pada draft Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna 2025-2029, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berikut penjabaran sasaran kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan [Nilai]	75
2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan [Indeks]	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan [Indeks]	100
4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	4.	Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks];	92
		5.	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	92
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6.	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP [%]	100
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks]	81
7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Indeks]	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
8	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	71,5
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	92
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	81
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88
		13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	100
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	95
		15	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,5
		16	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP [Nilai];	80
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tahuna [Inovasi];	1
		19	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai];	70

D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Kegiatan 2025

Berdasarkan dokumen kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2025, terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 19 (sembilan belas) indikator kegiatan yang meliputi:

1. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dengan target nilai 75 didapat dari pelaksanaan 1 (satu) kegiatan operasi intelijen;

2. *Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dengan target indeks 100 didapat dari hasil penilaian pemeriksaan untuk 1 Pelaku Usaha;

3. *Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target indeks 100 didapat dari hasil penilaian pemeriksaan untuk 6 Pelaku Usaha;

4. *Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif.*

Indikator Kinerja (IK) untuk sasaran kegiatan ini terdiri dari:

- a) Indeks kinerja operasi kapal pengawas dengan target 92 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas Hiu 15 untuk 31 Hari Operasi;
- b) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dengan target 92 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 untuk 20 Hari Operasi masing-masing unit; dan

5. *Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP didapat dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 3 (tiga) unit armada pengawasan;

6. *Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan target 81% untuk pelaksanaan penanganan 1 (Satu) perkara sanksi administratif;

7. *Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 94% untuk pelaksanaan penanganan 1 (satu) perkara;

8. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*

Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan ini ada 11 (sebelas) komponen indikator yaitu:

- a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target tahun 2025 adalah 71,5. Capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan nilai realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber data perhitungan capaian indikator ini berasal dari aplikasi Monev Kemenkeu;
- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 92 %. Capaian indikator kinerja ini adalah proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi. Sumber data untuk instrumen nilai berasal dari website online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Kementerian Keuangan RI;
- c) Indeks Profesionalitas ASN dengan indeks target 81 (delapan puluh satu) yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sumber data yang menjadi instrumen pencapaian adalah aplikasi si-ASN dan e-SKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- d) Penilaian Mandiri SAKIP dengan target nilai 88 (delapan puluh delapan) yang merupakan rangkaian catatan informasi untuk verifikasi pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja UPT;
- e) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 100%;
- f) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 95%
- g) Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik dengan nilai indeks target 88,5. IK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Survey dilakukan selama 4 (empat) kali yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun 2025;
- h) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 80% meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta peningkatan pelayanan publik;

-
- i) Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP dengan target 80, didapat dari kegiatan penilaian kearsipan lingkup DJPSDKP;
 - j) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna, dengan jumlah target 1 inovasi;
 - k) Nilai implementasi program budaya kerja dengan target 70, merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan satker, hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker;

Rencana aksi atas kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rencana Aksi Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025 pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2025 ini disusun dengan menjabarkan secara detail dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2025 dan khususnya dukungan terhadap pencapaian target draft Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2025-2029.

Perlu disadari bahwa keberhasilan program dan kegiatan pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna merupakan *resultante* dari keberhasilan bersama sebagai stakeholder pengawasan perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025, sehingga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fokus dan Jadwal Kegiatan Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
JUMLAH			14.293.185												
'032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		7.503.277												
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		6.930.075												
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	51 HO	5.941.545												
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		5.612.345												
'052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas		5.612.345	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		329.200												
'051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas		8.500	√											
'052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas		312.200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas		8.500							√					√
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 UNIT	988.530												
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat		988.530												
'051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		860	√	√										
'052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		986.810	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		860							√				√	√
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		196.455												
2351.AEA	Koordinasi	1 KEG	50.000												
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		50.000												
'052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		50.000					√							
2351.BCE	Penanganan Perkara	2 PERKARA	146.455												
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		30.080												
051	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif		1.125										√		
052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif		27.130										√		
053	Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif		1.825										√		
2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana		116.375												
051	Ekspose Awal TPKP		2.250									√			
052	Pemberkasasn Perkara TPKP		61.025												
054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP		5.940									√			
055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP		47.160									√			
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		376.747												
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam[Base Line]	1 KEG	124.747												
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		124.747												
051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		6.237	√											
052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		112.273								√	√	√		

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		6.237											√	
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan[Base Line]	2 LEMBAGA	20.000												
2352.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		20.000												
051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		600	√											
052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		18.430		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		970											√	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7 LEMBAGA	232.000												
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		82.000												
051	Perencanaan / persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		1.152	√											
052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		79.033		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		1.815											√	√
2353.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		150.000												
051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		32.960	√											
052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		96.140		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		20.900												√
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		6.789.908												
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		6.789.908												
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 UNIT	67.050												
2355.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		67.050												
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		67.050				√								
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 LAYANAN	6.146.809												
2355.EBA.956	Layanan BMN		22.000												
051	Perencanaan Pengelolaan BMN		22.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		18.700												
051	Perencanaan Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		18.700	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		53.088												
051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola		53.088	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.962	Layanan Umum		429.430												
051	Layanan umum rumah tangga		407.430	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		22.000												
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		30.060												
051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi		30.060	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran		5.593.531												
001	Gaji dan Tunjangan		3.690.643	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.902.888	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 UNIT	89.964												

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal		89.964												
'053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		89.964					√							
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	24 ORANG	69.300												
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		69.300												
'053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional		69.300	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 DOKUMEN	416.785												
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		108.000												
'052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran		108.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		55.650												
'052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan		55.650	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		66.850												
'051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan		66.850	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		143.235												
'052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP		64.500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		78.735	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		43.050												
051	Pengelolaan Arsip dan Persuratan		43.050	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna

Martin Yermias Luhulima, S.H, M.Si

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA

[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN PENDUKUNG (KOMPONEN / SUBKOMPONEN)		ANGGARAN / PAGU (RP)	TARGET / OUTPUT	SATUAN OUTPUT /	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana															
				2351.BCE.U04.051	Ekspose Awal TPKP	2.250.000														
				2351.BCE.U04.052	Pemberkasas Perkara TPKP	61.025.000	1	Perkara					1	1	1	1	1	1	1	1
				2351.BCE.U04.054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	5.940.000														
				2351.BCE.U04.055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	47.160.000														
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	108.000.000														
				2355.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	108.000.000	1	Layanan						1	1	1	1	1	1	1
		10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	108.000.000														
				2355.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	108.000.000	1	Layanan						1	1	1	1	1	1	1
		11 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	69.300.000														
				2355.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	69.300.000	24	Orang											1	1
		12 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	64.500.000														
				2355.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi	64.500.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		13 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBC.955	Layanan Manajemen Keuangan	66.850.000														
				2355.EBC.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	66.850.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.955	Layananan Manajemen Keuangan	66.850.000														
				2355.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	66.850.000														
				2355.EBD.955.052A	Penyusunan Laporan Keuangan lingkup UPT	66.850.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		15 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	65.888.000														
				2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.888.000														
				2355.EBA.961.054A	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.888.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		16 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	65.888.000														
				2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.888.000														
				2355.EBA.961.054A	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.888.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		17 Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	43.050.000														
				2355.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	43.050.000	1	Layanan								1	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN PENDUKUNG (KOMPONEN / SUBKOMPONEN)		ANGGARAN / PAGU (RP)	TARGET / OUTPUT	SATUAN OUTPUT /	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	10.000.000														
				2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10.000.000														
				2355.EBA.961.054C	Inovation Bootcamp	10.000.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1
		19 Nilai implementasi Program Budaya Kerja	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja															
				2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65.888.000	1	Layanan										1	1	1

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

REPUBLIK INDONESIA

Tahuna, 17 Maret 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Martin Yermias

S.H., M.Si